



Tinjauan Kelestarian SDA dari Perspektif Tata Kelola Kebijakan Publik

**KORUPSI MELALUI PERAN NEGARA (*STATE CAPTURE CORRUPTION*) DAN
BERKEMBANGNYA KORUPSI INSTITUSIONAL (*INSTITUTIONAL CORRUPTION*)**

HARIADI KARTODIHARDJO

FORUM DISKUSI KEBIJAKAN KEHATI

Jakarta | 19 Februari 2020

Lingkup Penyajian

01

ILMU KEBERLAN-
JUTAN (SUSTAIN-
ABLE SCIENCE) &
GAMBAR BESAR-
NYA

02

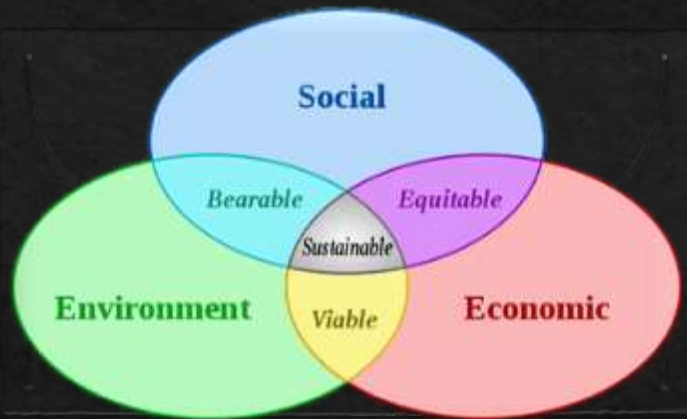
KONDISI EMPIRIS,
POLITIK PENGETA-
HUAN & POLITIK
KEPENTINGAN DI
INDONESIA

03

IMPLIKASI BAGI
KEBIJAKAN PUBLIK
& KEHATI

Perkembangan Ilmu Keberlanjutan

Sumber: Ian Scoone (2016).



KONSERVATIF, TEKNIS

Kemampuan sistem untuk bangkit kembali dari guncangan dan tekanan

Tumpuan: ilmu kealaman (*natural science*), sosial dan ekonomi



EKOLOGI POLITIK

Menempatkan hubungan antara lingkungan, kesejahteraan dan keadilan sosial

Tumpuan: ditambah dengan ilmu-ilmu politik



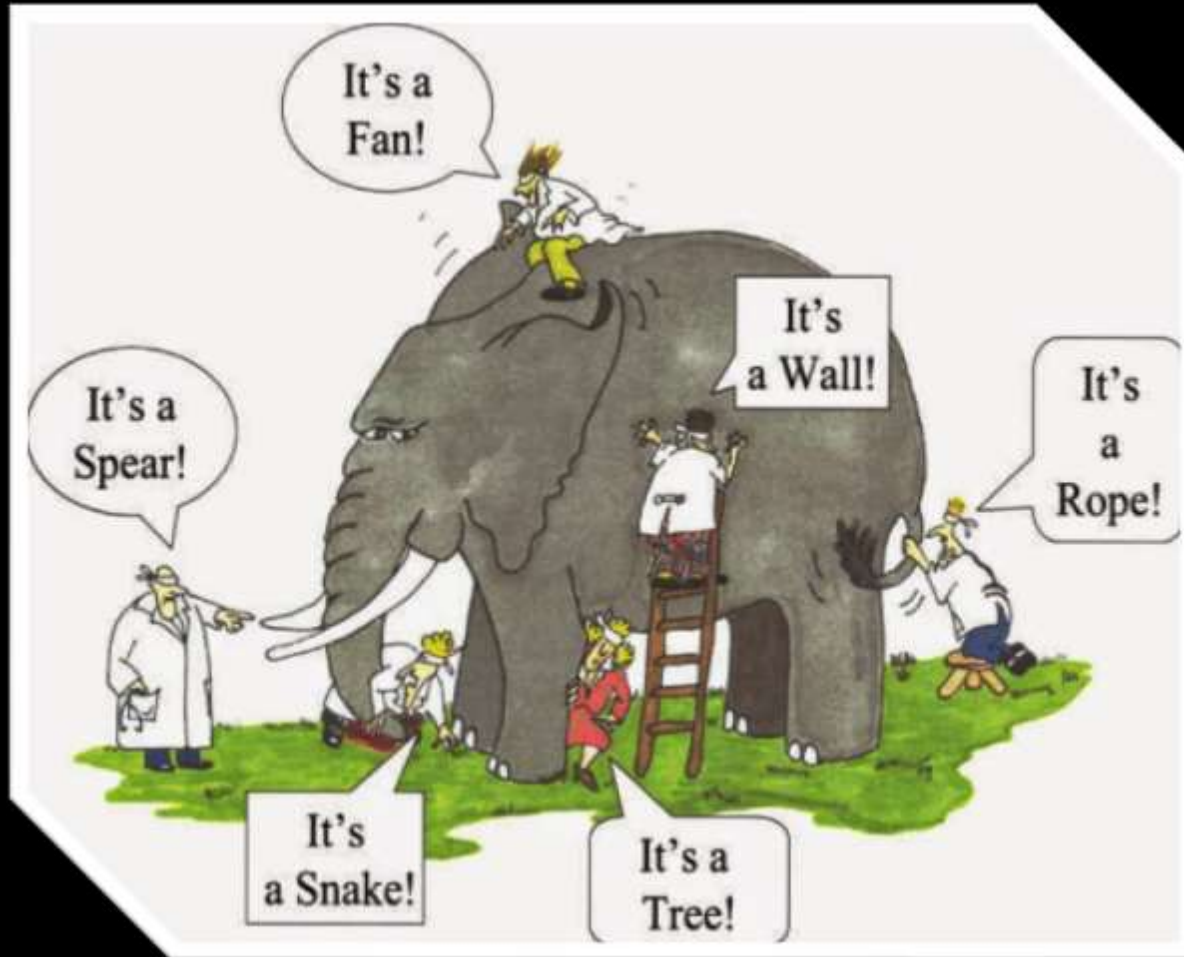
BEYOND SCARCITY

Kelangkaan bukan soal jumlah tapi soal akses—soal politik; gagasan keberlanjutan yg adil

Tumpuan: ditambah dengan ilmu kelembagaan

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SD) ITU YANG MANA?

“Kita harus dapat melihat GAJAH, bukan KAKI GAJAH”



- HANYA ILMU TERTENTU, TIDAK SEMPURNA MELIHAT SD—SADAR KETIDAK TAHUAN
- MASALAH BIASANYA BUKAN YANG TERLIHAT, TETAPI SEBAGAI HASIL PEMIKIRAN
- SELALU ADA ALTERNATIF CARA BERFIKIR—MENGHINDARI DOGMA

ARAH PENDEKATAN TRANS-DISIPLIN DALAM PENGELOLAAN SDA BERKELANJUTAN

TERDAPAT 5 SYARAT
DICAPAINYA SDA LESTARI
DAN ADIL

KINI SYARAT 2, 3, 4, 5 TIDAK
TERPENUHI

PEMAHAMAN &
IMPLEMENTASI ILMU-ILMU
EKONOMI, SOSIAL, INSTITUSI
DAN POLITIK SANGAT
MENDESAK

TRANSFORMASI
PENGUNAAN MULTI-
DISIPLIN MENUJU TRANS-
DISIPLIN MENJADI
KENISCAYAAN



Bagaimana norma, standar, kebijakan dan inovasi berjalan tanpa ada manipulasi dan korupsi kepentingan publik untuk **keuntungan pribadi**

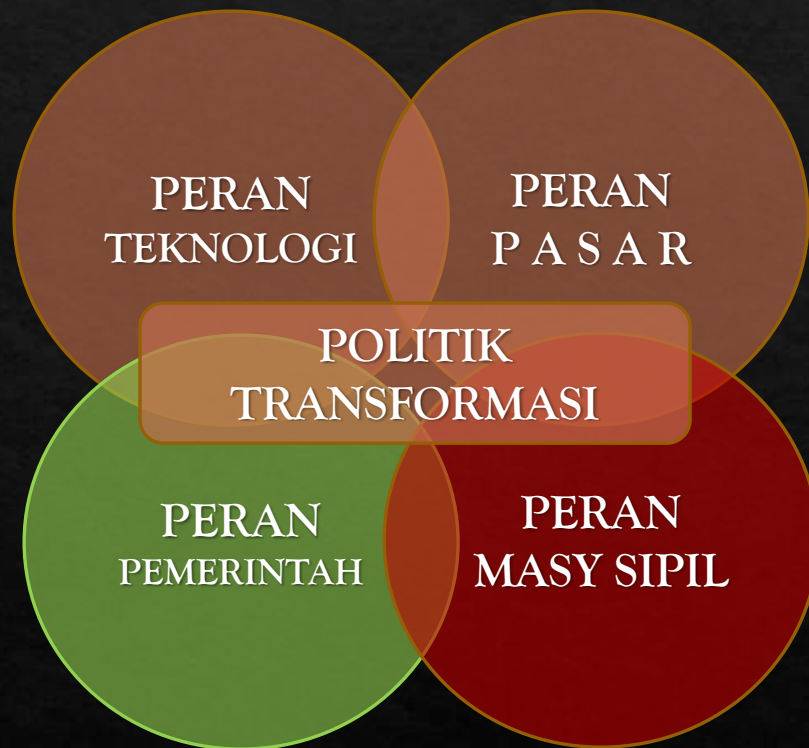
Bagaimana kelestarian SDA menjadi ukuran kinerja pengelola (operator) dan pemerintah/pemda (regulator) dan bukan hanya **kinerja administrasi**

Bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, dan ekologi menerima dampak negatif dan positif **secara adil**

Bagaimana pengelola SDA bersedia melakukan pelestarian berdasarkan **apa yang diterima dan apa yang dikorbankan**

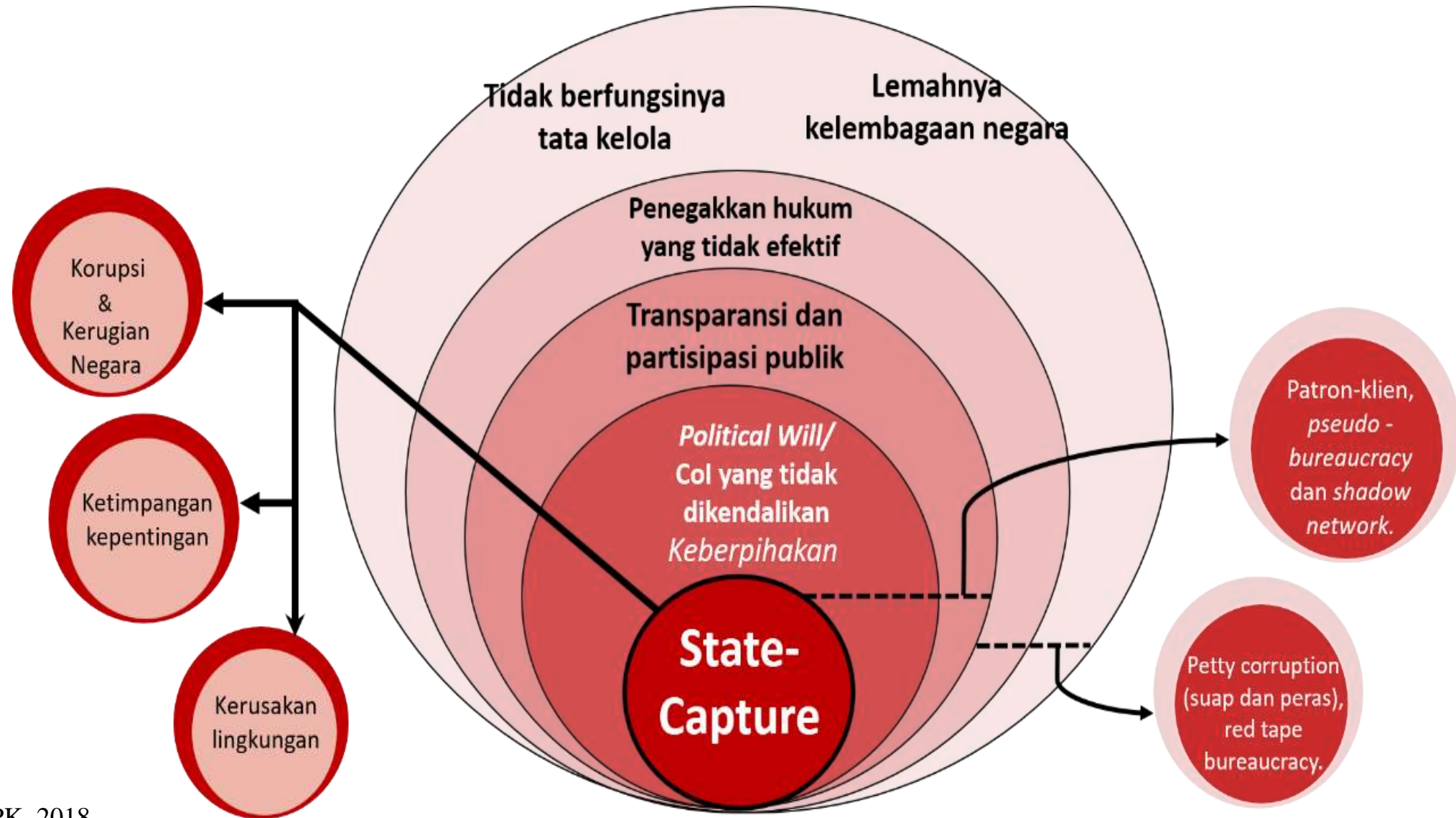
Bagaimana SDA **secara fisik ditata** sehingga jumlah yang dimanfaatkan tidak menyebabkan kapasitas pulih berkurang

KEBERLANJUTAN UNTUK : “Menjaga Daya Dukung Secara Adil”



- TEKNOLOGI DAN PASAR:
Negatif & Positif
- PERAN PEMERINTAH:
 - *State capture corruption* →
 - *Institutional corruption* →
- PERAN MASY SIPII—KEHATI

Penggunaan Alat-alat Negara untuk Kepentingan Kelompok



KORUPSI & MASALAH STRUKTURAL



Korupsi Politik

**Korupsi
Penegakan
Hukum**

**Korupsi
Perizinan**

**Korupsi
Pengadaan
Barang & Jasa**

**Korupsi
Pelayanan
Publik**

MASALAH POLITIK—STRUKTURAL SURVEY POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENDANAAN PILKADA 2016-2017—KPK



82,6%
2016: 70,3%
Menyatakan **adanya donatur**
dalam pendanaan Pilkada



36%
2016: 49%
Mengeluarkan biaya kampanye lebih
tinggi dari yang dilaporkan

71,3%
2016: 56,3%
Menyatakan donatur **mengharapkan**
balasan saat cakada menjabat



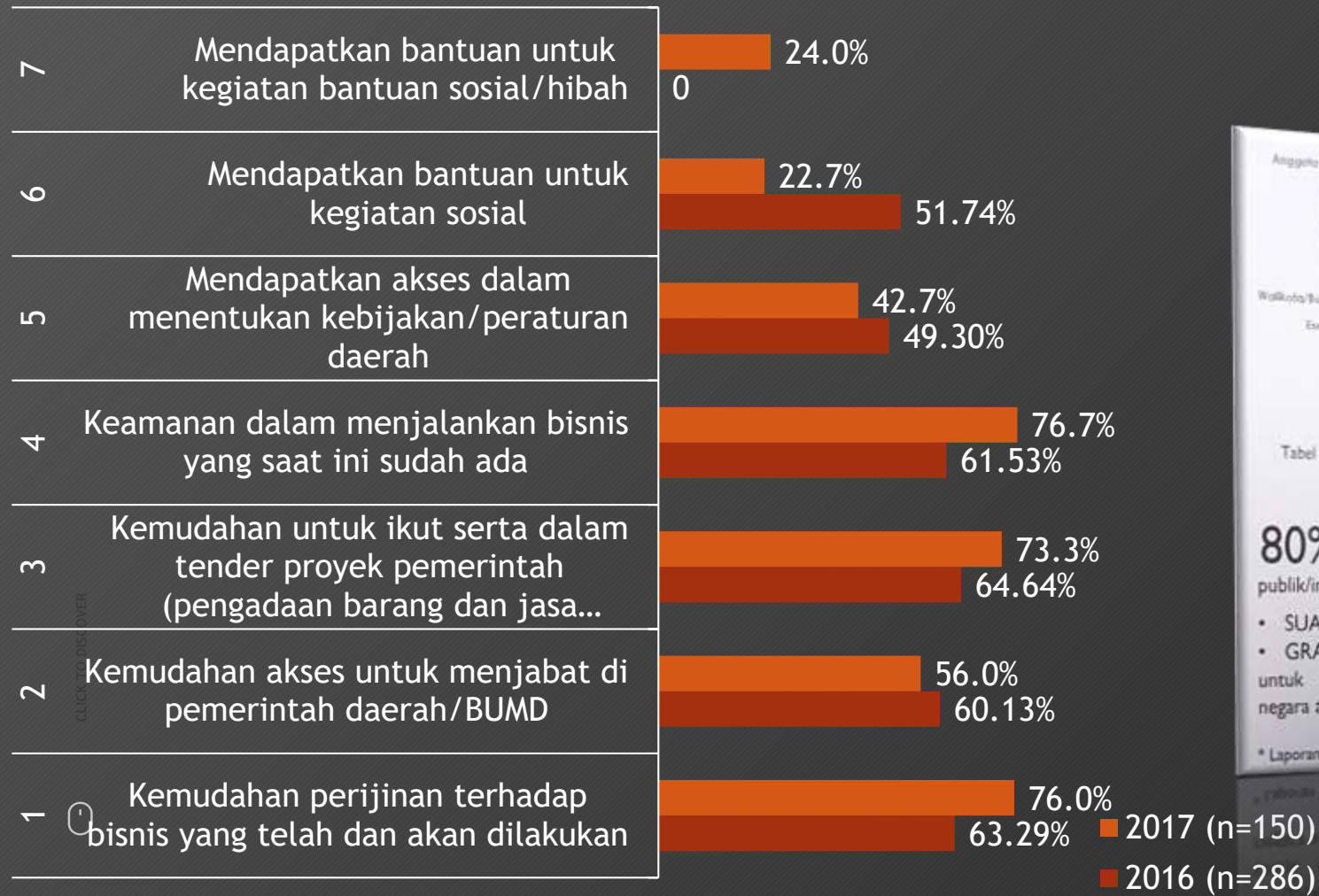
82,2%
2016: 75,8%
Menyatakan sebagian besar
cakada akan memenuhi
harapan donatur tersebut



47,3%
2016: 51,4%
Mengeluarkan dana Pilkada
melebihi kemampuan kas

MASALAH POLITIK—STRUKTURAL

HARAPAN DONATUR KEPADA CAKADA



Korupsi bukan hanya memperlancar, tetapi juga memastikan mendapat izin bahkan masuk dan ikut menentukan jalannya pemerintahan

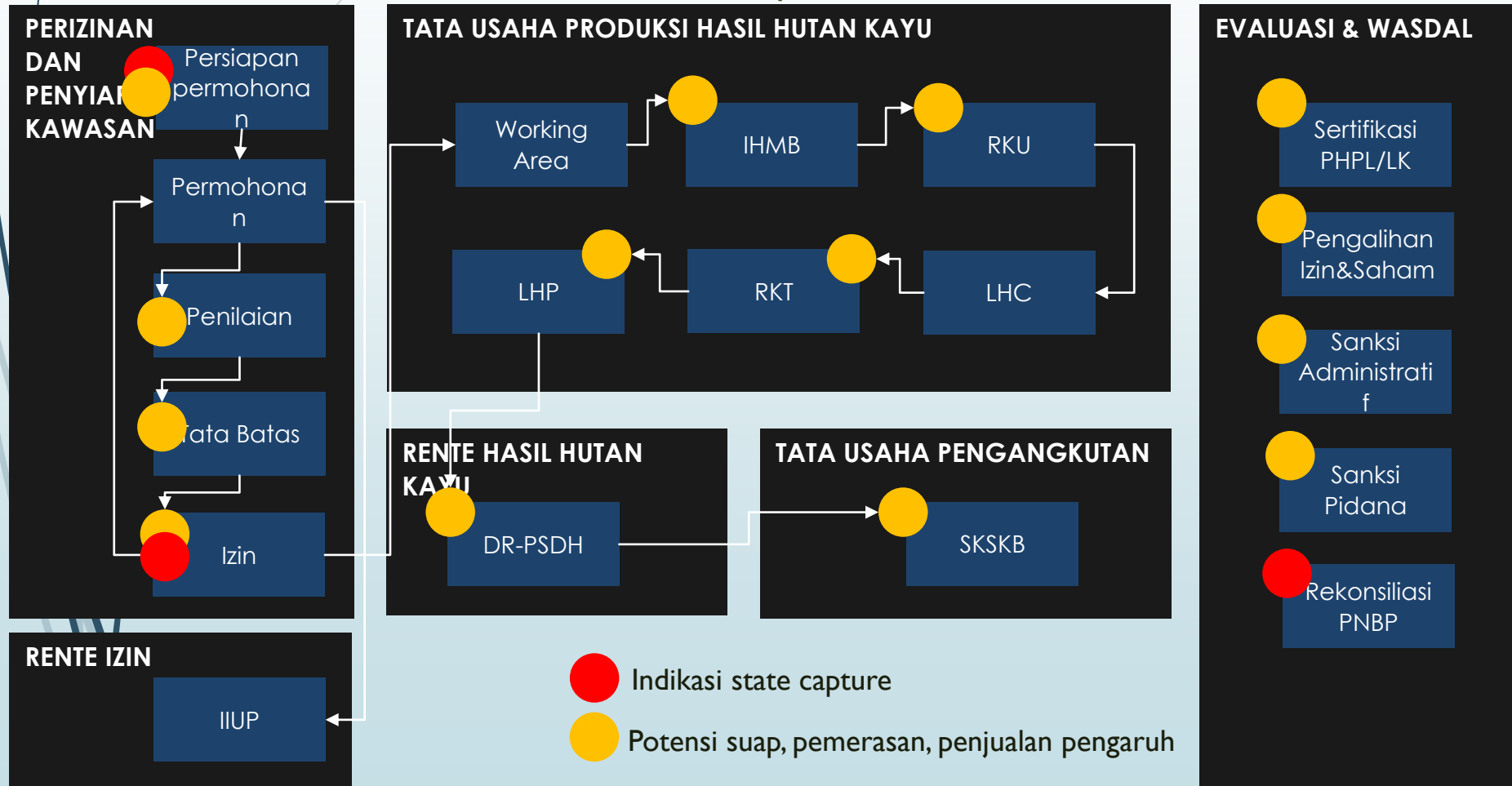
KASUS KORUPSI BERDASARKAN JENIS PERKARA KORUPSI

NO.	JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	JUMLAH	%
1	Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	8	164	26.5%
2	Perizinan	-	-	5	1	3	1		0		3	5	1	1	1	21	3.4%
3	Penyuapan	-	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	37	340	55.0%
4	Pungutan	-	-	7	2	3	-	-	0	-	1	6	1	1	0	21	3.4%
5	Penyalahgunaan Anggaran	-	-	5	3	10	8	5	4	3	-	4	2	1	1	46	7.4%
6	TPPU	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	1	3	2	19	3.1%
7	Merintang Proses KPK	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	0	0	2	7	1.1%
JUMLAH		2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	51	618	100.0%

Analisis CIA dan Identifikasi Biaya Transaksi

CONTOH: Titik Korupsi dalam Alur Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu (IUPHHK)

Bisnis proses dan sendi-sendi tata kelola usaha PHHK



Nilai suap pada 2015 sebesar: Rp 680 juta sd Rp 22 milyar per perusahaan per tahun.

PROSES PERIZINAN YG DITEMUKAN:

- a. Manipulasi peta,
- b. Pemerasan,
- c. Tawaran tambahan atau pengurangan luas izin sebagai alat negosiasi,
- d. Biaya pengesahan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan,
- e. Memperlambat proses,
- f. Proses tidak melalui BKPM/D atau PTSP,
- g. Adanya konsultan sebagai arena transaksi yang sudah ditunjuk oleh pejabat tertentu.



Transaksi dalam Organisasi

MENJADI MEDIUM penguasaan SDA dapat diperoleh dengan keistimewaan-keistimewaan, tanpa melalui prosedur yang seharusnya.



SOSIALISASI: Kooptasi (dari pimpinan atau klien), kompromi-kompromi yang berjalan seiring dengan tugas-tugas dan perintah-perintah, serta berjalan secara perlahan-lahan (*incremental*)



REGULASI/ STRUKTURAL

AKAR MASALAH: informasi tertutup; dipertahankan agar tetap berstatus “rahasia umum”; dijaga & dipelihara agar medium penguasaan SDA terus dpt dimanipulasi.

systemic corruptive regulations, criminogenic regulations, vulnerable regulations

Perizinan Kehutanan di Daerah, 2019

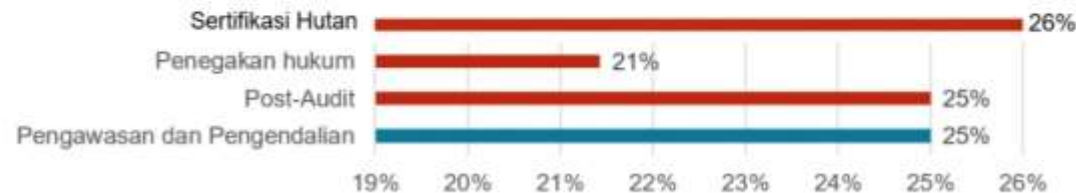
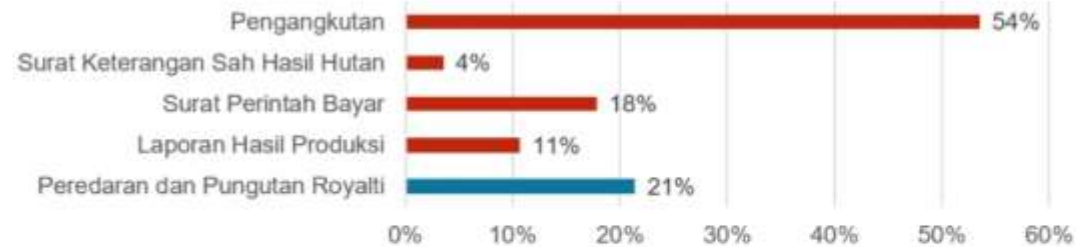
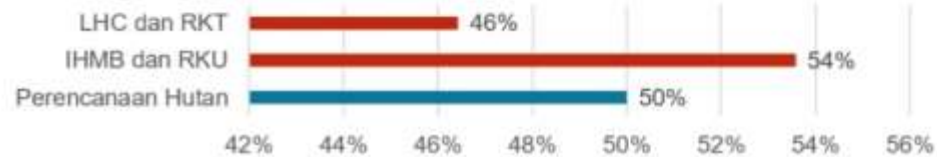
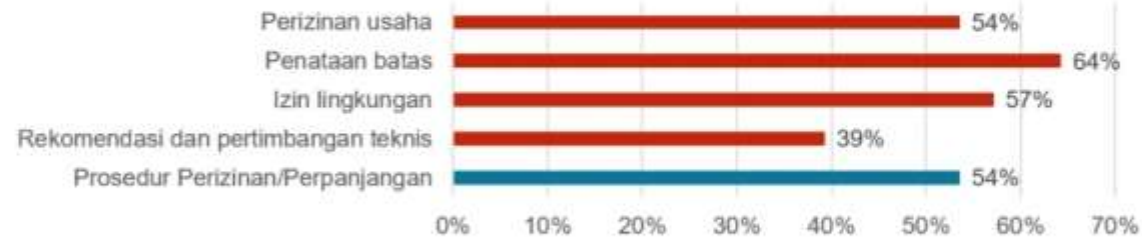
Informasi

Okt-Nov 2019

(%), responden (swasta) yang menyatakan ada suap untuk memperlancar pelayanan perizinan

BEBAN BIAYA INFORMAL KEGIATAN USAHA

Pembayaran tata batas (supervisi, dll) oleh izin usaha dilakukan melalui rekening pribadi



TATA KELOLA PERIZINAN 2019:

Sebagai bukti PP No 24/2018 mengenai *Online Single Submission* tidak berjalan

RINGKASAN: Potensi Moral Hazard Amdal & Ijin Lingkungan

SLHD Di seluruh propinsi, kabupaten dan kota (jumlah 539), terdapat 76 sd 194 investasi dan memerlukan studi lingkungan. Per tahun minimal ada 40.000 studi lingkungan. Dalam pembahasan di KPK, disebutkan dalam satu tahun potensi uang suap di Indonesia sekitar Rp 51 trilyun yang terkait perizinan.

PROSES	Pemerintah	Konsultan	Pemrakarsa	Masy	JUMLAH
Penyusunan Dokumen	6	4	2	1	13
Penilaian Dokumen	6	4	1	1	12
Penerbitan SKKL dan IL	4	1	-	-	5
Sistem Standardisasi	2	-	-	-	2
JUMLAH	18	9	3	2	32

Sumber Tabel: Evaluasi KLHK, 2017

TATA KELOLA 2019:

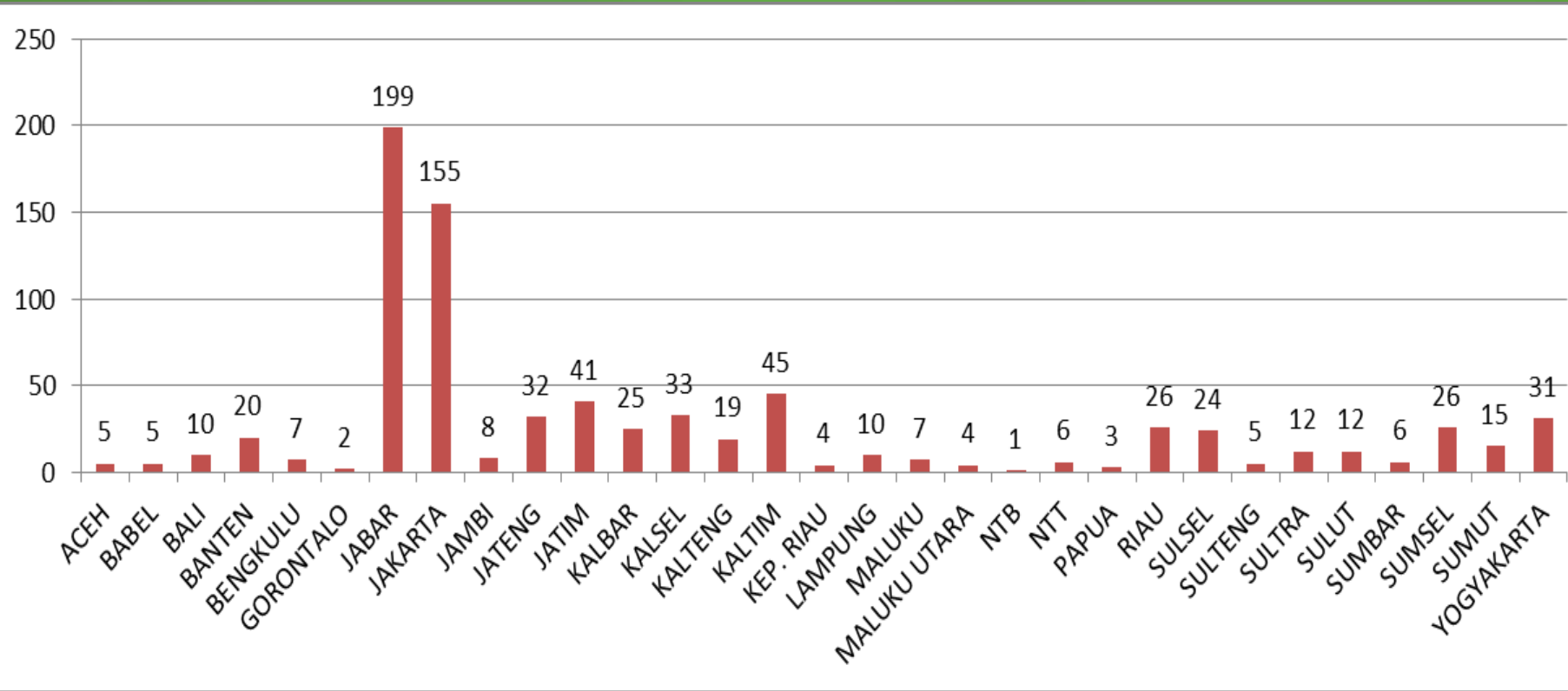
Dokumen public dirahasiakan

Konflik kepentingan ahli (*revolving door*: malam susun Amdal, pagi penilai Amdal)

Proses dilaksanakan untuk memenuhi syarat administrasi; kualitas dokumen yg layak 25%-30% (dari 7 propinsi).

Panitia Penilai di Tk Propinsi mendapat Rp 30 – Rp 40 jt per orang per Amdal/IL.

Jumlah dan Sebaran Penyusun Amdal yang Bersertifikat Kompetensi



VERIFIKASI Okt-Nop 2019

Situasi itu penyebab adanya sertifikat terbang

Sertifikat Penyusun Amdal di Jabar dan Jakarta digunakan secara fiktif di tempat lain, tanpa ada pemegang sertifikat.

Tarif yang ditemukan Rp 6 juta—Rp 18 juta,- per sertifikat

Pelaksanaan sertifikasi oleh LSK Amdal Intakindo:

- 86 UK (2009-2015)
- Kualifikasi ATPA = 594 sertifikat
- Kualifikasi KTPA = 383 sertifikat
- Total = 977 sertifikat

TOTAL SERTIFIKAT PERNAH DIBERIKAN = 977
TOTAL SERTIFIKAT YANG MASIH BERLAKU = 805

Sumber: LSK Intakindo
(per 12 Desember 2015)

Apa yang Terjadi ?

- ◇ BERJALANNYA ASPEK-ASPEK LEGAL DAPAT DIKUTI OLEH KEGIATAN ILLEGAL ATAU DISEBUT: “PSEUDO—LEGAL”
- ◇ KEGIATAN PSEUDO LEGAL MEMPENGARUHI DEFINISI MASALAH DAN ARAH SOLUSINYA—AKIBAT KEPENTINGAN
- ◇ SITUASI ITU DISEBUT “BAD GOVERNANCE”, YANG MEMERLUKAN SOLUSI KHUSUS
- ◇ PERKEMBANGAN TERKINI: SISTEM ONLINE, KETERBUKAAN INFORMASI, JARINGAN KERJA DI LUAR PEMERINTAH, PEMETAAN SOSIAL, BENEFICIARY OWNERSHIP, PROFILING, DITUJUKAN UNTUK SOLUSI INI—**Tapi mungkin akan dihapus oleh Omnibus Law**



• KORUPSI INSTITUSIONAL

Ketika semua pegawai di suatu lembaga sudah bekerja sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum, tetapi lembaganya tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat

YANG TERJADI: penghapusan birokrasi sebagai perlindungan publik

PARADOKS PENCEMARAN : perusahaan pencemar membayar ongkos politik paling besar, sehingga sistem politik milik mereka

Kemauan Mewujudkan Kelestarian (sustainability will) oleh masyarakat (termasuk pengusaha)	Kemauan Mewujudkan Kelestarian (sustainability will) oleh Publik (Kebijakan Pemerintah)	
Tinggi	Tinggi	Rendah
Rendah	I. TIDAK EFISIEN Korupsi, kekakuan birokrasi, kelemahan desain program	II. LEMAH Klientilisme, interpreneurship
	III. DILANDA KONFLIK <i>Out of date</i> , di luar konteks	IV. TIDAK BERSEDIA Menghindari tujuan publik



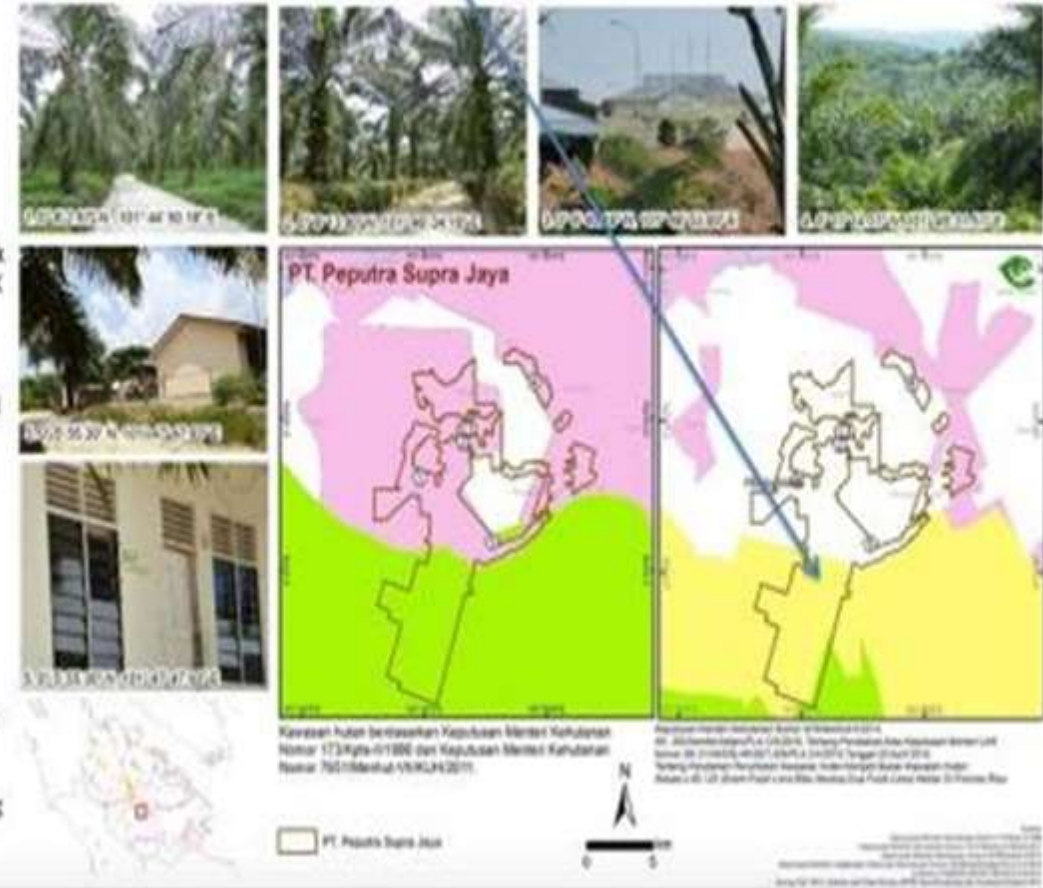
Contoh SCC: Pasal dalam RUU Pertanahan

Pasal 146

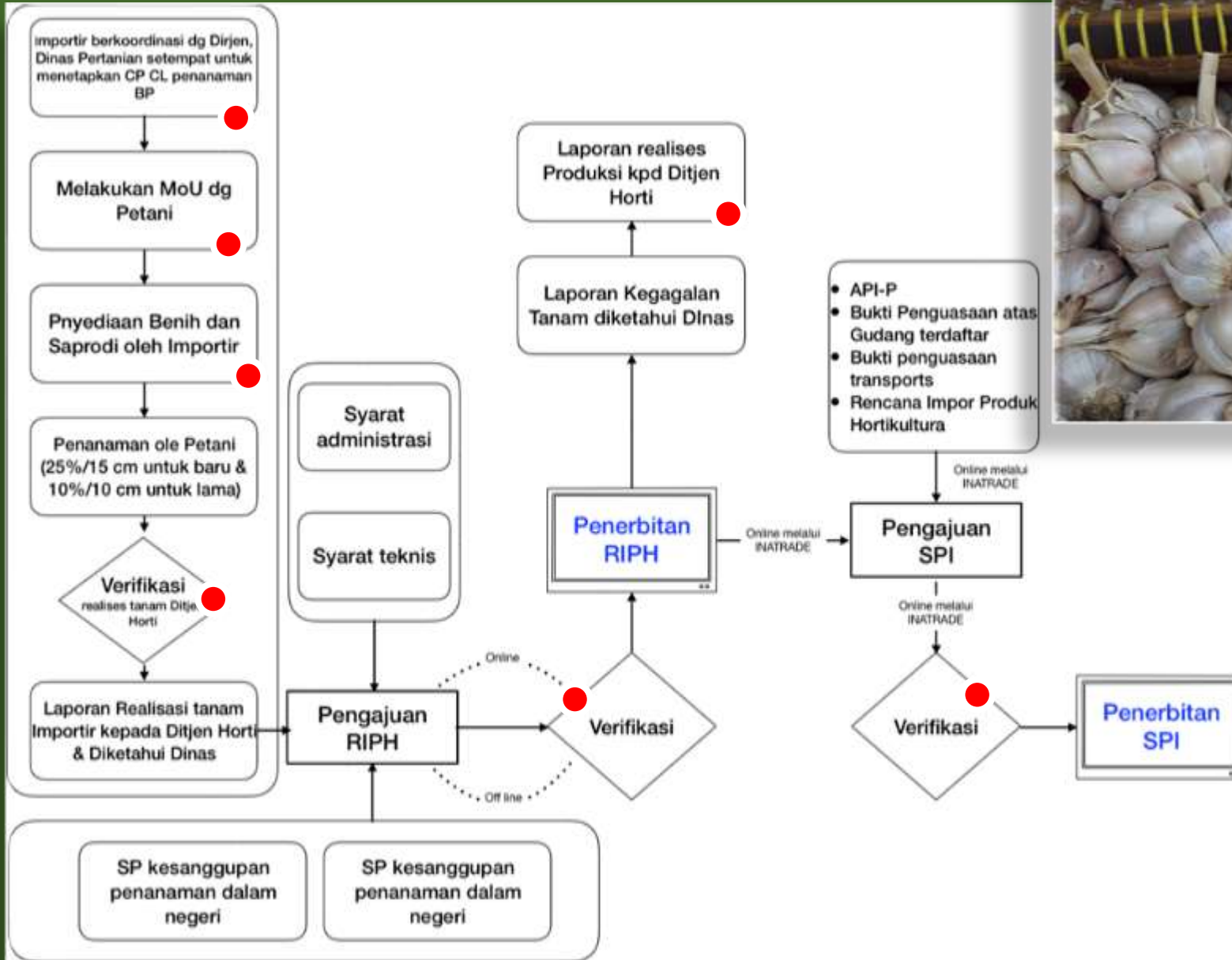
- Dalam hal pemegang Hak Guna Usaha telah menguasai fisik Tanah melebihi luasan pemberian hak guna usaha dan/atau Tanah yang diusahakan belum memperoleh Hak Atas Tanah, status hak guna usaha ditetapkan oleh Menteri.

Foto 1, 2 dan 4 merupakan kebun sawit Peputra Supra Jaya, diperkirakan umur tanaman sekitar 25 tahun, photo 4 ditemukan Pabrik Kelapa Sawit PT Peputra Supra Jaya yang telah beroperasi sejak 2014. Sebelumnya keluarnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, kebun PT Peputra Supra Jaya dan lokasi PKS merupakan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK) dan HPT. Namun berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, sebagian besar atau 6.276 hektar areal kebun PT Peputra Supra Jaya sudah menjadi Areal Penggunaan Lain. Luas kebun PT Peputra Supra Jaya lebih kurang 9.164 hektar. Namun berdasarkan Pansus DPRD Riau 2015 luas PT Peputra Supra Jaya lebih kurang 10.665 hektar

Dalam hal pemegang HGU Telah menguasai fisik tanah melebihi luasan pemberian HGU dan/atau yang diusahakan belum memperoleh Hak Atas Tanah, status HGU ditetapkan oleh Menteri

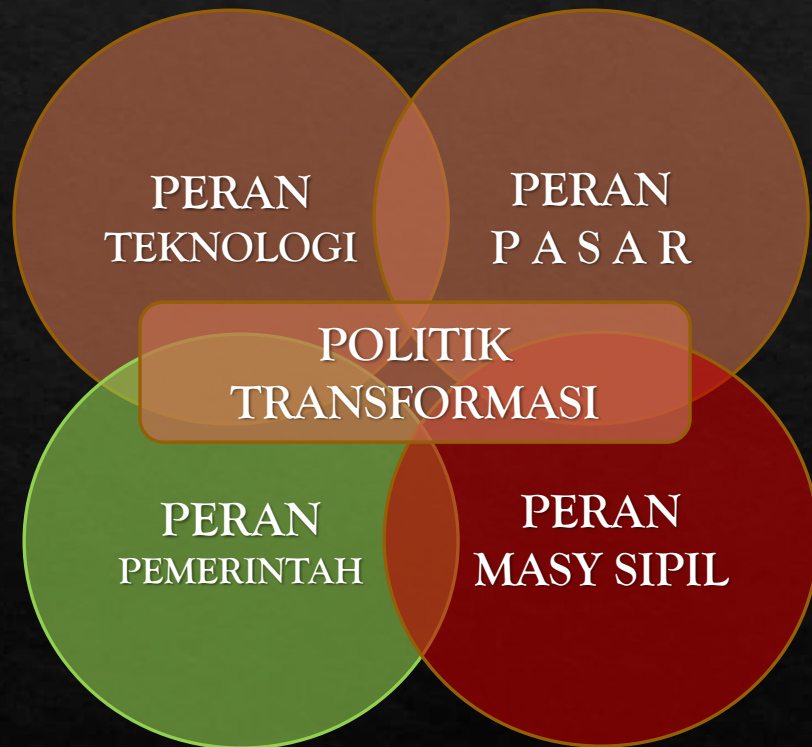


Potensi Moral Hazard Swasembada Bawang Putih



- Identifikasi titik-titik celah korupsi swasembada bawang putih
- Potensi suap Rp 2,8 Trilyun Rp per th

Dimana Letak Kebebasan Sipil?



Ian Scoone, 2016. the Politic of Sustainability
Ad Dvelopment. IDS—UK.

Dalam konteks PSDA, sudah terlalu banyak pelanggaran yang harus ditutupi:

Korupsi perizinan

Kesalahan lokasi izin

Tidak membayar pajak

Tidak menjalankan putusan pengadilan DII.

Sudah terjadi “*state capture corruption*” dan “*institutional corruption*” kronis yang menjadi Penggerak kebijakan

Korupsi Institutional dan Kebebasan Sipil

1. Jika kebebasan bagi semuanya, maka kelompok “orang super” akan menghapus birokrasi sebagai perlindungan publik (**Omnibus Law ??**).

*Merobohkan perlindungan publik semacam itu berarti kebebasan bagi miliarder dan korporasi dari “hambatan demokrasi”. Kebebasan yang dijanjikan kepada kita adalah kebebasan orang yang sangat kaya untuk mengeksploitasi kita (George Monbiot, April 2017, the Guardian “**The Problem With Freedom**”).*

2. Posisi kebebasan sipil berada dalam lingkaran “kepentingan nasional” :

*Pembatasan kebebasan berekspresi atas nama **ketertiban umum dan keamanan nasional** harus diberlakukan hanya di mana ada risiko nyata kerusakan pada kepentingan yang sah. (**Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspressi dan Akses ke Informasi**, yang diadopsi 1 Oktober 1995 oleh para ahli hukum internasional, keamanan nasional, dan hak asasi manusia Artikel 19, *The International Centre Against Censorship*).*

Peluang Korupsi dalam RUU Pertanahan

Harold Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Publik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran

Untuk itu, tujuan utama RUU Pertanahan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. RUU ini akan mengatur hak-hak pertanahan, termasuk hak milik, hak pakai, dan hak sewa. Selain itu, RUU ini juga mengatur tentang pendaftaran tanah, pemertanahan, dan pertanggungjawaban pertanahan. RUU ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan domestik terhadap sektor pertanian di Indonesia.

Institusi Korupsi dan Perombakan Kabinet

Harold Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Publik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran



RUU Pertanahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan domestik terhadap sektor pertanian di Indonesia. Selain itu, RUU ini juga mengatur tentang pendaftaran tanah, pemertanahan, dan pertanggungjawaban pertanahan. RUU ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan domestik terhadap sektor pertanian di Indonesia.

Kolom

OMNIBUS LAW DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

UNDANG-UNDANG sepupug, yang lebih terasa keren disebut omnibus law, tengah digodok pemerintah dan segera akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disahkan. Ia merangkum, memampatkan, dan menyederhanakan 70 lebih undang-undang yang sudah ada dan berjalan, di bawah nama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Dari total 2,9 juta hektare lahan kelapa sawit di Papua, hampir



biaya transaksi perizinan itu oleh para pelakunya dianggap sebagai nilai pembungkaman dalam menciptakan lapangan kerja, memunculkan ekonomi, dan meniadakan efek ganda pada keberlanjutan masyarakat.

Kolom

KORUPSI SUMBER DAYA ALAM

KORUPSI di sektor sumber daya alam adalah aktivitas yang merugikan negara dan masyarakat. Sektor sumber daya alam memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, korupsi di sektor ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak lingkungan.

Kolom

RAHASIA DATA SAWIT DAN MASYARAKAT KONSPIRATIF

MELALUI surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian baru-baru ini, pemerintah menaruh akasi publik terhadap data hak guna usaha (HGU) lahan kelapa sawit. Dalam surat itu, pemerintah meminta Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, serta pimpinan perusahaan seludinding di HGU tersebut. Padahal, sebelumnya, dalam segenak keterbukaan informasi, Mahkamah Agung memintakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka data tersebut. Poinnya yang tak pernah dilaksanakan Kementerian Agraria hingga muncul surat Deputi Pangan ini.

Kolom ini mencoba mengupas empat aspek mengenai data HGU yang penting dibuka bagi publik. Pertama, tumpang tindih lahan sawit dengan area pengunaan lain seluas 3,47 juta hektare yang berada di semua bagian kawasan hutan, baik konservasi, lindung, maupun produksi. Jika terungkap pada data hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tumpang tindih ini juga terjadi pada izin-izin lain, seperti pertanahan dan kehutanan, atau menumpang lahan hutan yang telah diklaim sebagai hutan adat atau adat. Untuk menelusurkannya, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dibutuhkan informasi mengenai kepastian lokasi, luas, serta perizinan lain-izin yang ada. Semua informasi tersebut ada dalam data HGU.

Kolom

KORUPSI POLITIK PERIZINAN

Sering ada masalah perizinan atau Ormas Perwakil-an. Sektor UPK yang mendominasi, atau memonopoli, undang-undang, inspeksi, atau pengawasan, atau terkait erat dengan itu. Undang-undang itu, beberapa perizinan perizinan, atau terkait erat dengan itu. Undang-undang itu, beberapa perizinan perizinan, atau terkait erat dengan itu. Undang-undang itu, beberapa perizinan perizinan, atau terkait erat dengan itu.

Kolom

PEMUTIHAN LAHAN DALAM RUU PERTANAHAN

RANCANGAN Undang-Undang Pertanahan bertanggal 21-22 Juni 2018 memuat tujuan peraturan ini dibuat, yakni melonggarkan dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.



Kolom

Hak untuk Tahu

Sering ada masalah perizinan atau Ormas Perwakil-an. Sektor UPK yang mendominasi, atau memonopoli, undang-undang, inspeksi, atau pengawasan, atau terkait erat dengan itu. Undang-undang itu, beberapa perizinan perizinan, atau terkait erat dengan itu.



biaya transaksi perizinan itu oleh para pelakunya dianggap sebagai nilai pembungkaman dalam menciptakan lapangan kerja, memunculkan ekonomi, dan meniadakan efek ganda pada keberlanjutan masyarakat.

Bagaimana fungsi KEHATI dan Masy Sipil?

1. KEHATI perlu ditegaskan sebagai “milik publik”:

Sebagai ruang terlindung untuk berpikir walau bertentangan dengan pendapat yang diterima, ruang untuk mempertanyakan kebijakan publik, untuk membayangkan dunia dari sudut pandang dan perspektif berbeda, dan, dengan demikian, untuk memahami apa arti memikul tanggung jawab pelestari kehati secara nasional.

2. KEHATI perlu ditegaskan bagian dari masyarakat sipil:

Fokus yang dapat dan seharusnya dilakukan KEHATI yaitu menciptakan komunitas, menumbuhkan rasa memiliki dan menempa hubungan serta membuat jaringan yang langgeng dengan komunitas.

OMNIBUS LAW VS LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah sudah menyerahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. Demi investasi, proteksi lingkungan hidup dipertaruhkan.



Proteksi lingkungan tak ditegaskan sebagai bagian dari keputusan industri



Tak ada lagi Komisi Penilai Amdal.



Izin lingkungan untuk perusahaan dihapus, diganti persetujuan lingkungan dari pemerintah



Tak ada penegasan informasi kelayakan lingkungan hidup dalam investasi mudah diakses masyarakat



Sembilan kriteria usaha berdampak penting dihapus Penilaian Amdal



Pengawasan dan sanksi administratif terhadap industri menjalankan proteksi lingkungan sepenuhnya oleh pemerintah pusat



Jenis-jenis sanksi administratif dihapus



Jenis-jenis sanksi administratif dihapus



Tertutup pintu gugatan akibat kerusakan lingkungan



Tertutup pintu gugatan akibat kerusakan lingkungan

Catatan Penutup

1. Gambar besar PSDA dan SD perlu ditelaah dan menjadi kerangka dasar penetapan advokasi kebijakan dan program kerja;
2. Membuka “ruang baru” (*policy space*) sebagai medium berekspresi dengan mempertimbangkan sumbatan yang ada;
3. Mencermati dan mempublikasi secara cepat hilangnya “perlindungan publik” maupun terjadinya SCC dan IC dalam penetapan peraturan-perundangan;
4. Menentukan dan menjalankan strategi bersama (koalisi): *regim pengetahuan—regim pengaturan vs perang posisi—politik perdebatan antara kekuasaan non-negara dan warga negara.*

Sekian

Hariadi Kartodihardjo

forestdigest.com

hariadi@apps.ipb.ac.id

hakabgr@gmail.com